

# PENENTUAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (KIHT) DI JAWA TENGAH

Ghiyats Alvares Avicenna<sup>1</sup>, Wiwik Budiawan S.T, M.T, Ph.D<sup>2</sup>

*Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

## Abstrak

According to Government Regulation No. 142/2015 on industrial estates, Minister of Finance Regulation No. 215/PMK.07/2021 on Tobacco Excise Revenue Sharing Funds. There are areas in Central Java that can be included as alternative candidate locations for the Tobacco Products Industrial Estate, but none of these areas have been selected as the Tobacco Products Industrial Estate. This research is to determine the prospective location of the Tobacco Products Industrial Estate. The calculation method uses Analytical Hierarchy Process (AHP). The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to compare alternatives against each criterion. The analysis process is carried out with an objective approach in order to provide recommendations. The criteria used are aspects of raw materials, production aspects, and sales aspects. As for the alternatives, namely Jepara Regency, Kebumen Regency, Magelang Regency, Purworejo Regency and Wonosobo Regency. The results of the calculation of criteria priorities are the raw material aspect has a priority value of 0.105, the production aspect is 0.637, and the sales aspect is 0.258. While the resulting alternative rating is Jepara Regency 0.309, Kebumen Regency 0.314, Magelang Regency 0.071, Purworejo Regency 0.162, Wonosobo Regency 0.145. Based on the results of data processing and analysis. The result of the selected alternative for the prospective location of KIHT is Kebumen District.

Keywords: Location Determination, Industrial Estate, Tobacco Products Industrial Estate, Analytical Hierarchy Process (AHP)

## 1 Pendahuluan

Rata-rata penerimaan cukai terus naik dari tahun ke tahunnya dengan dibuktikan data realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar Rp 226,79 triliun pada tahun 2022, jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp 195,52 triliun maka penerimaan cukai mengalami kenaikan sebesar 13,8% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Seiring dengan hal tersebut harga rokok juga mengalami kenaikan. Harga rokok di Indonesia mencapai Rp 23.361 per bungkus (isi 16 batang) pada tahun 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Nilainya meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 20.523 per bungkus. Indeks kemahalan rokok pun meningkat tipis menjadi 12,2% pada 2022. Harga rokok diperkirakan semakin meningkat pada tahun berikutnya. Perkiraan ini disebabkan pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok, diketahui tarif cukai rokok pada tahun 2021 sebesar Rp.565 per batang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp.679 per batang. Persentase

peningkatan akan menjadi 10% pada tahun 2023 dan 2024 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Hal ini tentunya sejalan dengan harapan dari pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tarif cukai yang sebagai bentuk menekan peredaran rokok di Indonesia. Konsumsi masyarakat tidak banyak terganggu ditengah kenaikan harga rokok, sehingga penjualan rokok tidak banyak berpengaruh. Kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah perokok dewasa meningkat sebanyak 8,8 juta. Jumlah perokok pada tahun 2021 sekitar 60,3 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 69,1 juta orang pada tahun 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan data tersebut dapat dihitung jumlah pengeluaran rokok masyarakat Indonesia yang sebanyak 69,1 juta orang, sekitar 64 triliun rupiah per tahun, sehingga rata-rata pengeluaran per kapita untuk rokok di Indonesia adalah Rp 82.183 per bulan pada tahun 2022. Nilai tersebut naik 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 76.583 per bulan (Badan Pusat Statistik, 2023).

---

<sup>1</sup>)Penulis Koresponden

<sup>2</sup>)Dosen Pembimbing

Harga rokok yang mengalami kenaikan juga mempengaruhi perilaku konsumen rokok. Perilaku konsumen berubah dari mengkonsumsi rokok premium ke rokok standar, bahkan konsumen rokok itu berpindah menjadi mengkonsumsi rokok ilegal yang bersumber dari IHT ilegal. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi IHT legal yang sudah taat dalam membayar cukai karena hal tersebut merupakan salah satu pemasukan terbesarnya. Solusi terakhir yang didapat ialah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) adalah kawasan yang dijadikan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) memiliki beberapa regulasi yang mendasarinya. Salah satu peraturan yang menjadi landasan KIHT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri. Peraturan ini menekankan tentang pentingnya untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan industri, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat untuk pemantauan dan pengawasan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 juga berperan penting dalam konteks KIHT. Peraturan ini mengatur penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Peraturan ini memastikan bahwa dana hasil cukai tembakau digunakan secara efisien, transparan, dan menciptakan insentif yang tepat untuk pengembangan keberlanjutan industri tembakau.

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki total 29 kabupaten, sekitar 15 kabupaten diantaranya masih aktif terlibat dalam produksi tembakau. Menyikapi peraturan tersebut, Provinsi Jawa Tengah berpeluang untuk lebih berpeluang mengembangkan industri tembakau melalui KIHT. Berdasarkan peraturan tersebut, ada sembilan daerah di Jawa Tengah yang memenuhi syarat dan kemungkinan untuk dijadikan alternatif mendirikan kawasan industri. Beberapa daerah tersebut sampai saat ini belum ada satupun daerah yang resmi terpilih menjadi KIHT. Syarat yang digunakan adalah adanya infrastruktur penunjang industri, belum adanya kawasan industri, dapat menyediakan tanah seluas 5-50 hektar

(Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2015), dan memiliki industri hasil tembakau (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa di antaranya memenuhi syarat, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan langkah yang lanjut dalam mengidentifikasi dan menentukan daerah yang akan menjadi calon lokasi KIHT di Provinsi Jawa Tengah.

## 2 Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah observasional yang memiliki tujuan untuk menerangkan subjek dan objek yang ada dilapangan serta mengolah dan menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan fakta berdasarkan lapangan dan dideskripsikan melawati kata-kata dan menjadi data yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan kuantitatif untuk menghitung dan mengukur data yang didapat serta memberikan asumsi-asumsi yang mampu menyederhanakan perhitungan. Melalui penelitian ini akan menghasilkan calon lokasi KIHT di Jawa Tengah. Untuk metode perhitungannya menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Kriteria didapatkan dengan cara wawancara kepada Disperindag Jateng. sedangkan menentukan alternatif dengan cara melihat nilai kontribusi industri tembakau kepada pendapatan asli daerah tersebut. Pada proses pembobotan alternatif terhadap kriteria, memiliki responden dari Disperindag Jateng. Setelah menemukan alternatif terpilih maka dilakukan Analisis untuk mengetahui bahwa alternatif tersebut dapat menunjang keberlangsungan pembangunan KIHT.

Data-data yang diperoleh mencakup data sekunder berupa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan KIHT, serta data Primer yang berupa hasil kuesioner. Sampel kuesioner menggunakan teknik purposive sampling diambil dari informan yang berasal dari instansi pemerintah selaku *owner solving* yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah.

## 3 Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Menentukan Kriteria

Melalui wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah

terkait Kriteria untuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) :

**1. Aspek Bahan Baku**

Sumber bahan baku : Fokus pada kualitas dan keberlanjutan sumber-sumber bahan baku tembakau yang digunakan dalam produksi.

Seleksi dan penanganan bahan baku: Melibatkan penggunaan bahan baku berkualitas tinggi dan pengendalian mutu dalam pengolahan bahan baku tembakau.

**2. Aspek Produksi**

Proses produksi : Memastikan adanya proses produksi yang sesuai dengan standar keamanan, kebersihan, dan kualitas untuk menghasilkan produk tembakau yang baik.

Pengendalian kualitas : Melibatkan langkah-langkah pengendalian kualitas selama proses produksi, termasuk pemantauan mutu, pengujian, dan penerapan standar produksi yang ketat.

**3. Aspek Pemasaran**

Branding dan kemasan: Menekankan pentingnya branding dan kemasan yang menarik, informatif, dan memenuhi standar peraturan yang berlaku.

Distribusi dan penjualan: Memastikan adanya sistem distribusi yang efisien dan memperhatikan keberlanjutan rantai pasokan untuk menghadirkan produk tembakau berkualitas kepada konsumen.

**3.2 Menentukan Alternatif**

Dalam konteks ini, perhitungan yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sektor industri tembakau di daerah mana saja yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian daerahnya. Berikut merupakan Rumus untuk mencari Kontribusi suatu sektor terhadap pendapatan Daerah (Halim, 2004):

$$K_1 = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

$K_1$  = Kontribusi sektor

X = Pendapatan sektor

Y = PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, maka hasil nilai kontribusi akan dibagi menjadi 6 kategori sebagai berikut (Halim, 2004).

**Tabel 3.1 Kategori Nilai Kontribusi**

Ukuran	Kategori
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup Baik
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
0,0 – 10%	Sangat Kurang

Untuk mencari pendapatan per tahun, memerlukan produksi per hari dari setiap alternatif. Berikut merupakan hasil produksi per hari dari setiap alternatif.

**Tabel 3.2 Produksi Rokok Per Hari**

Calon Alternatif	Produksi Rokok per Hari
Kabupaten Jepara	36.620
Kabupaten Grobogan	5.200
Kabupaten Kebumen	33.600
Kabupaten Magelang	20.000
Kabupaten Pati	16.000
Kabupaten Purworejo	33.160
Kabupaten Temanggung	10.000
Kabupaten Wonogiri	1.200
Kabupaten Wonosobo	36.560

Dengan berpatokan pada jumlah produksi rokok diatas, maka selanjutnya mencari pendapatan per tahun dari masing-masing Kabupaten agar dapat menemukan nilai kontribusi. Menghitung pendapatan menggunakan rumus (Boediono, 2012):

$$TR = P \times Q \times T$$

TR = Pendapatan Per Tahun  
 Q = Jumlah Produksi  
 P = Asumsi Harga Cukai Rokok/ batang  
 T = Waktu (Minggu libur, jadi 26 x 12)

Dalam menghitung kontribusi sektor terhadap pendapatan daerah menggunakan

rumus yang tertera. Sehingga didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut.

$$TR \text{ Jepara} = 36.620 \times 600 \times (26 \times 12) \\ = 6.855.264.000$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{6.855.264.000}{12.920.000.000} \times 100\% \\ = 53,06\%$$

Pada tabel merupakan rekapitulasi hasil perhitungan dari daerah yang digunakan sebagai alternatif tersebut serta menyertakan parameter hasil nilai kontribusi berdasarkan kategori pada tabel.

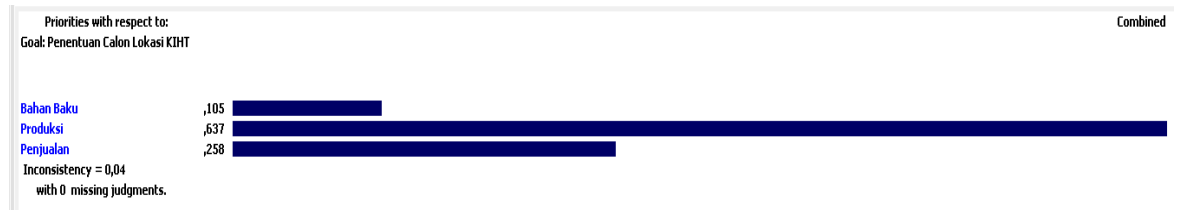
**Tabel 3.3 Rekapitulasi Hasil Nilai Kontribusi**

Calon Alternatif	Pendapatan Per Tahun	Aset Daerah	Kontribusi sektor terhadap aset daerah	Parameter
Kabupaten Jepara*	6.855.264.000	12.920.000.000	53,06%	Sangat Baik
Kabupaten Grobogan	973.440.000	27.730.000.000	3,51%	Sangat Tidak Layak
Kabupaten Kebumen*	6.289.920.000	17.640.000.000	35,66%	Cukup Baik
Kabupaten Magelang*	3.744.000.000	8.900.000.000	42,07%	Baik
Kabupaten Pati	2.995.200.000	33.640.000.000	8,90%	Sangat Tdak Layak
Kabupaten Purworejo*	6.207.552.000	330.800.000.000	45,24%	Baik
Kabupaten Temanggung	1.872.000.000	21.430.000.000	8,74%	Sangat Tidak Layak
Kabupaten Wonogiri	224.640.000	19.740.000.000	1,14%	Sangat Tidak Layak
Kabupaten Wonosobo*	6.844.032.000	21.990.000.000	31,12%	Cukup Baik

### 3.3 Menentukan Prioritas kriteria

Dalam tahap ini, penetapan angka prioritas bergantung pada dua perwakilan dari Disperindag Jawa Tengah. Jumlah total

dua responden dari Disperindag terlibat dalam proses ini. Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan aplikasi *Expert Choice*.



Gambar 3.1 Bobot Prioritas Kriteria

Setelah langkah awal menentukan prioritas kriteria, tahap berikutnya adalah menyusun pembobotan alternatif terhadap kriteria tersebut. Dalam proses ini, angka prioritas tetap ditentukan oleh dua perwakilan dari Disperindag Jawa Tengah yang berperan sebagai responden. Hasil dari tahap ini menggunakan *Expert Choice* agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil pembobotan alternatif terhadap kriteria yang telah dilakukan.

Alternatif	Rating
Jepara	.309
Kebumen	.314
Magelang	.071
Purworejo	.162
Wonosobo	.145

Gambar 3. 2 Rating Alternatif

Berdasarkan dari Tabel diatas, telah terpaparkan hasil dari 2 responden dari Disperindag Jawa Tengah. Dari hal tersebut didapatkan hasil bahwa Kabupaten Kebumen Unggul dari Kabupaten lainnya

#### 4 Analisis

##### 4.1 Analisis Sensitivitas

###### 1. Analisis sensitivitas kriteria Bahan Baku

Setelah dilakukan dengan cara menurunkan 10% dan menaikkan nilai dari 10% hingga 30% didapatkan nilai bobot alternatif Kebumen sebagai lokasi KIHT semakin menurun, artinya ketika preferensi pembobotan kriteria bahan baku oleh responden meningkat atau berkurang akan memberikan efek penurunan nilai bobot prioritas alternatif Kebumen. Namun secara keseluruhan, alternatif Kebumen

masih menjadi alternatif prioritas karena memiliki nilai bobot tertinggi didua uji coba perubahan kenaikan nilai bobot prioritas kriteria bahan baku.

###### 2. Analisis sensitivitas kriteria Produksi

Setelah dilakukan dengan cara menurunkan 10% dan menaikkan nilai dari 10% hingga 30% didapatkan nilai bobot alternatif Kebumen sebagai lokasi KIHT semakin menurun, dimana puncaknya pada kenaikan sebesar 30%. Artinya ketika preferensi pembobotan kriteria produksi oleh responden meningkat akan memberikan efek penurunan nilai bobot prioritas alternatif Kebumen. Jika dilihat secara keseluruhan, alternatif Kebumen masih menjadi alternatif prioritas ketika nilai bobot prioritas produksi diturunkan 10% dan dinaikan 10%. Akan tetapi ketika nilai bobot prioritas produksi dinaikkan sebesar 30% alternatif Jepara yang menjadi prioritas utama.

###### 3. Analisis sensitivitas kriteria Penjualan

Setelah dilakukan dengan cara menurunkan 10% dan menaikkan nilai dari 10% hingga 30% didapatkan nilai bobot alternatif Kebumen sebagai lokasi KIHT semakin menurun, dimana puncaknya pada kenaikan sebesar 30%. Artinya ketika preferensi pembobotan kriteria produksi oleh responden meningkat akan memberikan efek penurunan nilai bobot prioritas alternatif Kebumen. Jika dilihat secara keseluruhan, alternatif Kebumen masih menjadi alternatif prioritas ketika nilai bobot prioritas produksi diturunkan 10% dan dinaikan 10%. Akan tetapi ketika nilai bobot prioritas produksi dinaikkan 30% alternatif Jepara yang menjadi prioritas utama.

## 4.2 Analisis Hasil

Pada analisis ini akan mengumpulkan data yang relevan dari lima alternatif. Data yang didapat berasal dari Disperindag Jateng dan

Badan Pusat Statistik. Berikut merupakan tabel dari rekapitulasi hasil analisis dan menampilkan ranking berdasarkan hasil yang telah ditemukan.

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Analisis**

Kabupaten	Aspek Bahan Baku		Aspek Produksi		Aspek Penjualan	
	Luas Lahan (Hektar)	Ranking	Jumlah IHT	Ranking	Jumlah Konsumen rokok	Ranking
Jepara	5	5	41	3	957.701	1
Kebumen	750	3	165	1	745.919	3
Magelang	5000	1	11	5	750.799	2
Purworejo	301	4	42	2	412.786	5
Wonosobo	4.130	2	31	4	467.156	4

Setelah dilakukan analisis berdasarkan data yang relevan dari Disperindag Jawa Tengah dan Badan pusat Statistik. Selanjut akan menampilkan perbandingan dari hasil Metode AHP dimana nilai prioritas diubah menjadi

ranking, dengan hasil analisis diatas. Perbandingan ini akan dinormalisasikan dengan menggunakan perbandingan rata-rata geometrik, berikut merupakan tabel rekapitulasi hasilnya.

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Perbandingan**

Kabupaten	Aspek Bahan Baku			Aspek Produksi			Aspek Penjualan		
	AHP	Analisis	Setelah normalisasi	AHP	Analisis	Setelah normalisasi	AHP	Analisis	Setelah normalisasi
Jepara	4	5	5	1	3	2	1	1	1
Kebumen	2	3	3	2	1	1	2	3	2
Magelang	5	1	2	5	5	5	4	2	3
Purworejo	3	4	4	4	2	3	3	5	4
Wonosobo	1	2	1	3	4	4	5	4	5

Berikut merupakan rekapitulasi hasil dari normalisasi rangking keseluruhan kriteria dari masing – masing alternatif.

**Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Ranking Perbandingan**

Kabupaten	Setelah Normalisasi
Jepara	2
Kebumen	1
Magelang	4
Purworejo	5
Wonosobo	3

Dari tabel tersebut didapatkan hasil dengan rangking tertinggi jatuh pada Kabupaten Kebumen, sedangkan untuk rangking terendah jatuh pada Kabupaten Purworejo. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kebumen menjadi pilihan utama sebagai calon lokasi KIHT.

### 4.3 Analisis Lokasi

#### 1. Alur jarak distribusi di Jawa Tengah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jarak yang akan dihasilkan apabila KHIT berapa di Kabupaten Kebumen. Karena KIHT pada penelitian ini mewakili Jawa Tengah sehingga analisis ini kan menghitung jarak dari sembilan daerah input alternatif bila kedepannya akan berencana mendukung keberlangsungan KIHT di Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Jepara memiliki jarak terjauh yaitu 249 km dengan estimasi perjalan memakan waktu sekitar 5 jam 24 menit. Kabupaten Grobogan memiliki jarak 204 km dengan estimasi perjalan memakan waktu sekitar 5 jam 16 menit. Kabupaten Wonogiri Memiliki jarak 200 km dengan estimasi perjalanan memakan waktu sekitar 4 jam 45 menit. Kabupaten Temanggung memiliki jarak sebesar 206 km dengan

estimasi waktu perjalanan 2 jam 47 menit. Kabupaten Magelang memiliki jarak 97 km dengan estimasi waktu perjalanan 2 jam 21 menit. Kabupaten Wonosobo memiliki jarak 83 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 2 jam 14 menit. Kabupaten Purworejo memiliki jarak sekitar 44 km dengan estimasi waktu sekitar 1 jam 1 menit.

#### 2. Alur jarak distribusi di Kabupaten Kebumen

Untuk didaerah Kabupaten Kebumen itu akan dihitung jarak dari daerah yang menghasilkan bahan baku yang berlimpah ada didua kecamatan yaitu Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Karangsambung (Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2021). Untuk pusat produksi akan berada di Kecamatan Gombong (Pemerintah Kabupaten Kebumen, 2021). Serta untuk penjualan akan mengarah kepada jantung kota Kabupaten Kebumen yaitu Kecamatan Kebumen.

Kecamatan Karanggayam ke Kecamatan Gombong memiliki jarak tempuh sekitar 19 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 41 menit. Kecamatan Karangsambung ke Kecamatan Gombong memiliki jarak tempuh sekitar 36 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 1 jam 5 menit. Kecamatan Gombong ke Kecamatan Kebumen memiliki jarak tempuh sekitar 21 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 36 menit. Jika KIHT ini berjalan dengan kriteria bahan baku berada di Kecamatan Karanggayam, kriteria produksi berada di Kecamatan Gombong, serta kriteria penjualan berada di Kecamatan Kebumen maka siklusnya memilki jarak 40 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 17 menit. apabila KIHT ini berjalan dengan kriteria bahan baku berada di Kecamatan Karangsambung, kriteria produksi berada di Kecamatan Gombong, serta kriteria penjualan berada di Kecamatan Kebumen maka siklusnya memilki jarak 72 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 41 menit

## 5 Kesimpulan

1. Kriteria KIHT yang didapatkan dari Undang-undang dan dari instansi pemerintah yaitu Disperindag Jateng. Kriteria KIHT yang didapatkan dari Undang-undang yaitu adanya infrastruktur penunjang industri, belum adanya kawasan industri, dapat menyediakan tanah seluas 5-50 hektar (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2015), dan memiliki industri hasil tembakau (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Kriteria KIHT yang didapatkan dari instansi pemerintah yaitu Disperindag Jateng. Kriteria KIHT itu didapatkan dengan wawancara dan didapatkan adanya 3 kriteria pada KIHT yaitu aspek bahan baku, aspek produksi, dan aspek penjualan. Aspek bahan baku yaitu berfokus pada kualitas dan keberlanjutan sumber-sumber bahan baku tembakau yang digunakan dalam produksi. Aspek produksi yaitu memastikan adanya proses produksi yang sesuai dengan standar keamanan, kebersihan, dan kualitas untuk menghasilkan produk tembakau yang baik. Aspek penjualan yaitu memastikan adanya sistem distribusi yang efisien dan memperhatikan keberlanjutan rantai pasokan untuk menghadirkan produk tembakau berkualitas kepada konsumen.
2. Hasil dari perhitungan bobot kriteria adalah aspek bahan baku mempunyai bobot 0,105, aspek produksi mempunyai bobot 0,637, dan aspek penjualan mempunyai bobot 0,258. Sedangkan rating alternatif yang dihasilkan adalah Kabupaten Jepara 0,309, Kabupaten Kebumen 0,314, Kabupaten Magelang 0,071, Kabupaten Purworejo 0,162.
3. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan serta melakukan analisis mendalam, ditemukan bahwa Kabupaten

Kebumen meraih ranking tertinggi, sementara Kabupaten Purworejo menduduki posisi terendah dalam evaluasi ini. Oleh karena itu, dengan pertimbangan ini, Kabupaten Kebumen secara tegas menjadi pilihan utama sebagai calon lokasi Kawasan Industri Hijau Terpadu (KIHT).

## 6 Daftar Pustaka

- Boediono. (2012). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- BPS, B. P. (2023). *Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Merokok selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Rata-rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu (Persen) 2021-2022*. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- DISPERINDAG, D. P. (2022). *Data Jumlah IHT di Jawa Tengah*. Semarang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah.
- Kemenkeu, K. K. (2022). *Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kemenkeu, K. K. (2022, Desember Kamis). *Sri Mulyani Happy, Pendapatan Cukai Rokok Nyaris Rp 200 T*. Dipetik Juli Senin, 2023, dari CNBC Indonesia: [https://www.cnbcindonesia.com/research/20221222080741-128-399084/sri-mulyani-happy-pendapatan-cukai-rokok-nyaris-rp-200-t#:~:text=Realisasi%20Pendapatan%20Cukai%20Hasil%20Tembakau%20\(CHAT\)&text=Tarif%20rata%20rata%20tertinggi%20diketahui,tahunan%20hingga%20](https://www.cnbcindonesia.com/research/20221222080741-128-399084/sri-mulyani-happy-pendapatan-cukai-rokok-nyaris-rp-200-t#:~:text=Realisasi%20Pendapatan%20Cukai%20Hasil%20Tembakau%20(CHAT)&text=Tarif%20rata%20rata%20tertinggi%20diketahui,tahunan%20hingga%20)
- Kurniawati, E. (2020). Analysis of The Location Determination of Cassava-Based Industrial Cluster Development in Jember Regency. *Jurnal Agroteknologi*.



- Maliene, V. (2016). Comparative Analysis of MCDM Methods for the Assessment of Sustainable Housing Affordability. Dalam M. N. Mulliner E, *Comparative Analysis of MCDM Methods for the Assessment of Sustainable Housing Affordability* (hal. 146-156). Omega
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. (2021, November Rabu). *Studi Komperatif ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Kabupaten Soppeng, Bupatei Kebumen: Kebumen Potensial Dibuat Kawasan Industri Hasil Tembakau* . Retrieved Agustus Senin, 2023, from Pemerintah Kabupaten Kebumen Argocily of Java: [https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/2/6639](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/6639)
- Rezaei, J. (2015). *Best-Worst Multi-Criteria Decision-Making Method*. Omega.
- Sinaga, J. (2009). Penerapan AHP pada Perusahaan BUMN Sebagai Tempat Kerja Mahasiswa. 24.
- T.L.Saaty. (1993). *Decision Making for Leader: The Analitical Hierarchy Process for Decisions in Complex World*. Pittburgh.
- Tutek, H. G. (2012). Sayisal Yontemler (Quantitative Methods). *Istanbul: Beta*, 329–376.